

L O K A K A R Y A
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB
BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

PERSEPSI FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN IPB TERHADAP
PROGRAM DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KKN IPB

Oleh

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN IPB

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PERSEPSI TERHADAP PROGRAM DAN ORGANISASI 1)
PELAKSANAAN KKN IPB

Oleh

FATETA IPB

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah berlangsung sejak 1975. Dalam rentang waktu 13 tahun sudah silih berganti organisasi pelaksana KKN baik ditingkat IPB maupun di tingkat fakultas. Sudah berbagai program yang dicanangkan dan dilaksanakan. Sebelum melangkah ke tahun mendatang, perlu kiranya dikaji kembali, apakah organisasi pelaksana ini sudah bekerja efisien dan efektif, apakah program yang dilaksanakan sudah menyentuh sasaran dan sudah berhasil membawa perubahan dalam pembangunan masyarakat pedesaan yang dijadikan sebagai sasaran selama ini dan apakah masukan-masukan yang didapatkan mahasiswa sudah dapat memenuhi keinginan IPB sesuai dengan kandungan tujuan dalam pedoman pelaksanaan KKN.

Berdasarkan beberapa alasan, tiga tahun yang lalu pelaksanaan KKN di IPB mengalami modifikasi dengan dicanangkannya "KKN Profesi". Inti program KKN profesi ini dititik beratkan dan disesuaikan dengan bidang studi atau program studi di masing-masing jurusan dan fakultas yang ada di lingkungan IPB. Pelaksanaannya bervariasi di beberapa

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata IPB, 21-22 Desember 1988, di LPPM IPB, Bogor.

jurusan dan fakultas dan daerah sasarannya tidak hanya petani atau masyarakat pedesaan saja tetapi sudah meluas ke industri-industri yang ada di daerah perkotaan atau daerah sekitar kota-kota besar. Semakin meluasnya tanah sasaran dan semakin beragamnya program KKN yang dilaksanakan IPB pada tahun-tahun terakhir ini maka sudah waktunya untuk ditinjau kembali status, tujuan, program dan organisasi KKN IPB. Hasil telaahan dan rumusan yang didapatkan dalam loka-karya ini akan dapat dijadikan sebagai pegangan minimal untuk 5 tahun mendatang.

STATUS DAN TUJUAN

Di beberapa fakultas di lingkungan IPB ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di samping kewajiban lainnya untuk dinyatakan selesai studinya. Kewajiban tersebut adalah praktek lapang (PL) dan KKN, kedua kewajiban ini memiliki tujuan yang sama atau hanya sedikit sekali perbedaannya.

Dua tahun terakhir ini, khususnya di Fateta, pelaksanaan PL ini dikaitkan dengan pelaksanaan KKN profesi. Permasalahan yang muncul adalah pengertian "pengabdian kepada masyarakat" dalam pelaksanaan KKN yang dikaitkan dengan "Kerja Nyata" dengan "praktek" pada pelaksanaan PL. Ketiga hal ini secara esensial berbeda, praktek dan kerja nyata belum tentu pengabdian kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi, seorang mahasiswa bisa saja melakukan praktek atau

kerja nyata di suatu laboratorium atau di suatu pabrik, tetapi yang dilakukannya tersebut belum tentu berbentuk pengabdian pada masyarakat. Di samping itu, pengabdian pada masyarakat mempunyai konotasi mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat sehingga unsur pengembangan kurang tercermin dalam pengabdian pada masyarakat tersebut. Untuk itu perlu kiranya dirobah istilah ini menjadi "Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat". Jika digunakan istilah ini maka formulasi tujuan KKN akan mengalami perubahan yang mendasar.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diformulasikan kembali status dan tujuan KKN serta PL yang dilaksanakan oleh IPB secara keseluruhan atau oleh beberapa fakultas di lingkungan IPB. Lebih jelasnya, kalau ada fakultas atau jurusan yang melaksanakan PL maka kiranya tidak perlu lagi melaksanakan KKN.

PROGRAM DAN ORGANISASI

Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan KKN IPB 1988/1989 yang disusun oleh LPPM dan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam proposal lokakarya maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok pembahasan. Ketiga pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Program pembangunan yang menyangkut diversifikasi pertanian, pengembangan koperasi dan lingkungan hidup.
2. Program KKN yang sesuai dengan kebutuhan IPB dan relevan dengan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyara-

kat dan dituntut adanya peningkatan profesionalisme di dalam melaksanakan kegiatannya.

3. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata.

Ketiga butir pokok bahasan di atas berintikan formulasi tujuan, program dan organisasi pelaksana KKN IPB untuk tahun-tahun mendatang.

GBHN 1988 telah memberikan tuntunan dalam pelaksanaan pembangunan yang menitikberatkan kepada pertanian yang tangguh dan industri yang kuat. Sebagai "linkage" antara pertanian yang tangguh dan industri yang kuat telah dirumuskan pula dalam GBHN 1988 dalam bentuk menggalakkan "industri pengolahan hasil pertanian" (agroindustri). Salah satu masalah utama dalam pengembangan agroindustri ini adalah pengadaan bahan baku (hasil pertanian) secara kontinyu, berkualitas dan tidak terlalu beragam dan disesuaikan dengan permintaan pasar (khusus untuk impor sebagai penghasil devisa). Pada butir satu terdapat 3 (tiga) program KKN IPB, yaitu: (a) diversifikasi pertanian, (b) pengembangan koperasi, dan (c) lingkungan hidup. Ketiga butir program ini belum menyentuh secara langsung apa yang dirumuskan oleh GBHN 1988 untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan industri yang kuat. Untuk itu program ini perlu disempurnakan.

Kebutuhan IPB dalam pelaksanaan KKN, relevan dengan pembangunan daerah dan meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam butir

membutuhkan pembinaan dan memakan waktu yang panjang untuk dikembangkan. Untuk itu terlalu jauh harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan KKN.

Organisasi pelaksana KKN yang selama ini dibentuk di IPB sudah bekerja dengan baik. Hanya perlu disempurnakan dalam mekanisme kerja. Adanya tim koordinasi di tingkat IPB dan Satgas di tingkat jurusan atau fakultas belum tertata dengan baik karena tenaga-tenaga yang dilibatkan adalah staf pengajar yang sudah memiliki beban kerja yang tidak ringan. Perlu dicarikan jalan keluar agar tenaga-tenaga yang mengelola KKN tidak merangkap tugas-tugas lain yang juga menyita banyak waktu. Untuk itu perlu dihindari jabatan rangkap yang menyulitkan yang bersangkutan untuk menekuni tugas pokoknya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN di IPB untuk tahun-tahun mendatang dapat diteruskan dengan penyempurnaan organisasi, program dan sistem pengelolaannya. Bagi fakultas-fakultas yang melaksanakan PL diberikan keleluasaan untuk menjadikan KKN bersifat fakultatif.

Program KKN yang dicanangkan oleh Tim Koordinasi tingkat IPB (LPPM) tahun 1988 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan pokok dalam pembangunan pertanian yang tangguh dan industri yang kuat dengan "linkage" agroindustri.

Personalia organisasi pelaksana KKN baik di tingkat IPB maupun di tingkat fakultas atau jurusan diusahakan agar tidak terlalu banyak merangkap jabatan di luar tugas sebagai pelaksana KKN. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan lancar, pendanaan harus jelas dan pungutan dana partisipasi dari mahasiswa kalau dapat dihindari dan kalaupun akan dilaksanakan juga maka diintegrasikan ke dalam pungutan SPP.